

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan pelibatan masyarakat. Pelaksanaan musrenbang juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah terhadap urusan pemerintahan, masyarakat, serta pembangunan. Jika hanya satu dari beberapa komponen pemerintah, seperti (masyarakat, pemerintah, serta swasta) tidak memainkan peran serta fungsi, pembangunan tidak akan maju (Mustanir et al., 2018). Maka dari itu, musrenbang disebut juga forum pendidikan yang memungkinkan warga negara guna berperan aktif pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah. Pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat.

Partisipasi, menurut Medgley et al. (1986, hlm. 21-23), bukan hanya salah satu tujuan pembangunan sosial, tetapi juga merupakan elemen intrinsik dari proses tersebut. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat serta partisipasi masyarakat, menurut Midgley, saling terkait. Yang pertama berkaitan dengan tema-tema luas pembangunan sosial serta pembentukan kemungkinan bagi orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, serta sosial suatu negara, yang kedua mengacu pada keterlibatan langsung orang-orang biasa dalam permasalahan lokal.

Permasalahan musrenbang sampai saat masih menjadi bahan kajian yang tiada henti dibicarakan pada setiap forum pembangunan yang setiap saat digaungkan oleh pemerintah, pada hakekatnya, pelaksanaan musrenbang juga melibatkan masyarakat/stakeholder yang saling memikirkan cara serta melaksanakan hasil musrenbang. Musrenbang merupakan mekanisme yang menjadi tempat untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat serta bagaimana pemerintah meresponnya. Namun pada pelaksanaannya, musrenbang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu mempunyai kekurangan yang hampir mirip, seperti:

- 1) Tidak dapat menyelesaikan semua isu strategis di tingkat lokal
- 2) Kinerja dengan koordinasi antara instansi pemerintah serta masyarakat yang belum terintegrasi.
- 3) Tidak ada jaminan untuk mengontrol partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan
- 4) Sinkronisasi distribusi rencana suatu pembangunan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dijamin sepenuhnya (Nor et al., 2018).

Proses suatu perencanaan pembangunan yang di komunikasikan pada masyarakat selama ini masih menitikberatkan pada kandungan informasi dari pada bentuk komunikasinya. Hal ini akan mempengaruhi makna serta hilangnya makna dari informasi tersebut.

Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan Musrenbang melalui Bappeda. Melalui perbincangan kooperatif antara aparat pemerintah dengan masyarakat, pemerintah memberikan informasi berupa proses pengajuan rencana pembangunan, besaran anggaran, serta hal-hal strategis daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi, gagasan, serta pemahaman untuk dapat menyampaikan rencana pembangunan di daerahnya, yang kemudian dapat dituangkan dalam RKPD serta APBD, sehingga memungkinkan terjadinya pembangunan yang diinginkan. Seluruh masyarakat di Kabupaten Sijunjung hampir seluruhnya telah mengikuti kegiatan pembangunan daerahnya melalui proses musrenbang di daerahnya masing-masing.

Keterlibatan masyarakat merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat yang diberikan dalam proses pengambilan keputusan, dalam penyelenggaraan program, dalam menikmati manfaat program, serta dalam penilaian program dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Partisipasi dalam masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu dalam pencapaian suatu kegiatan tanpa membahayakan kepentingan mereka yang terlibat. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan kegiatan pembangunan yang pengambilan keputusannya untuk kepentingan masyarakat. Ketika keterlibatan masyarakat serta perencanaan pembangunan digabungkan, sebuah konsep yang disebut perencanaan pembangunan partisipatif tercipta.

Fenomena tersebut peneliti lihat pada saat kegiatan musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung pada tanggal 19 Oktober 2021. Kegiatan Musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII terlihat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat kita lihat dari kehadiran partisipan yang hadir, dari 120 undangan yang disebar hanya 60 orang dengan kata lain hanya 50 % saja tingkat kehadiran masyarakat/partisipan pada acara musrenbang yang diadakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan pesan yang tepat serta efektif agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, pesan dari persuader yang merupakan Wali nagari Bukit Bual diperlukan untuk melakukan pengarahan kepada masyarakat dengan memberikan solusi betapa pentingkan musrenbang yang dilaksanakan.

Pra-musrenbang, yang pada hakikatnya merupakan wacana perencanaan pembangunan di tingkat jorong, dilakukan di Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sebelum musrenbang. Sebelum Musrenbang Kelurahan dilaksanakan, setiap jorong menyerahkan daftar kebutuhan masyarakat hasil pramusrenbang yang teridentifikasi kepada kantor kelurahan. Aparatur Nagari Bukit Bual memberikan daftar kebutuhan identifikasi tiap jorong pada tahapan Musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, namun tidak memperdebatkan kebutuhan mana yang menjadi prioritas kegiatan yang akan direkomendasikan pada tahap selanjutnya. Pihak kelurahan akan membuat daftar prioritas kegiatan. Akibat dari situasi ini, pemerintah Nagari terus memiliki kubu atas pengaturan kegiatan utama untuk Musrenbang yang akan

datang. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam penyebaran informasi, rekomendasi, serta umpan balik.

Dalam proses penyampaian informasi kepada komunikator, tujuan yang sangat penting adalah mengubah sikap, pendapat-pendapat serta perilaku komunikator serta menjadi konsultan. Pesan harus disampaikan dengan efektif agar pesan tersampaikan sesuai tujuan yang diinginkan. Sebelum menyampaikan informasi kepada sasaran, Anda harus melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan dapat berjalan lancar sesuai rencana. Persiapan semacam ini menurut Wilbur Schramm disebut "*The message must be available*", yang artinya ketika target membutuhkan pesan, pesan itu harus ada.

Jika ada banyak kriteria, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta tingkat pendapatan, partisipasi akan lebih tinggi. Gender merupakan penentu yang signifikan dari kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial saat ini. Gender adalah klasifikasi gramatikal kata serta istilah terkait lainnya yang umumnya dikaitkan dengan dua jenis kelamin atau netralitas. Menurut Fakih, gender juga terkait dengan pemisahan peran, tugas, serta tanggung jawab laki-laki serta perempuan sebagai konsekuensi dari kesepakatan atau pembentukan masyarakat (2016:112). Pada masyarakat di Nagari Bukit Bual lebih banyak melakukan partisipasi terhadap kegiatan musrenbang adalah yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini dikarenakan kegiatan musrenbang para masyarakat laki-laki memiliki peran penting melaksanakan kegiatan musrenbang.

Komunikasi yang menarik akan meningkatkan salah satu tingkat keterlibatan. Komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi di mana komunikator berusaha membujuk orang lain untuk bertindak serta berperilaku dengan cara

yang diinginkan komunikator (Mulyana, 2002). Komunikasi persuasif berusaha untuk meningkatkan atau memodifikasi sikap serta perilaku, oleh karena itu fakta, serta daya tarik yang memotivasi semuanya harus digunakan untuk mendukung tujuan persuasif. Tujuan dari setiap method persuasi adalah sama: membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pembujuk. Persuader adalah mereka yang melakukan tindakan persuasi. Dengan begitu banyak method untuk meyakinkan individu, aspek paling penting dari kegiatan persuasi adalah bahwa pembujuk harus memperhatikan kebutuhan serta minatnya sendiri.

Pada dasarnya tujuan dari kegiatan persuasif adalah mendorong komunikator untuk mengubah sikap, pendapat, serta perilakunya secara sukarela, bukan karena paksaan. Suranto A.W menyatakan: “Dalam kegiatan persuasif ini, seseorang atau sekelompok orang yang dibujuk harus dengan sukarela serta senang hati mengubah sikapnya berdasarkan informasi yang diterimanya” (ILHAM et al., 2021). Maka semakin baiknya komunikasi yang digunakan maka menjadi salah satu pendorong semakin meningkatnya partisipasi para masyarakat dalam mengikuti semua kegiatan yang akan dilakukan pada daerah masyarakat tersebut

Penelitian ini juga dilakukan oleh Courtney (2021) yang menunjukkan hasil bahwa presentasi publik pra serta posttreatment dinilai pada sembilan kompetensi komunikasi verbal serta non verbal inti dengan netral peninjau mirip dengan penelitian sebelumnya, peserta menunjukkan perbaikan dalam sikap komunikasi (OASES) serta kemampuan yang dirasakan untuk membangun hubungan teman sebaya (PROMIS Peer Relationships), khususnya Peserta usia sekolah.

Investigasi (Aisyah, 2015): (1) Dalam proses belajar mengajar, derajat ketercapaian variabel komunikasi persuasif sebesar 78,49 persen yang tergolong dalam kategori sesertag. (2) Kategorisasi harga r hitung $>$ r tabel ($0,738 > 0,304$) untuk hubungan antara komunikasi persuasif dalam proses belajar mengajar dengan hasil belajar menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan ($0,738$) antara keduanya. Dengan rerata t hitung sebesar $6,324 >$ t tabel $2,021$ pada ambang signifikansi 5%, Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut diharapkan bahwa kepada sekolah agar mampu meningkatkan cara serta teknik berkomunikasi persuasif pada proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, peneliti berpendapat bahwa penting untuk memahami komunikasi persuasif dalam partisipasi masyarakat serta peran pemerintah Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dalam tinjauan rencana pembangunan Nagari Bukit Bual 2021 (Musrenbang). Berdasarkan kajian di atas, Peneliti tertarik mengajukan judul: *“Hubungan Komunikasi Persuasif Dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Nagari (Studi Pada Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung)”*.

1.2 **Rumusan Masalah**

Sijunjung merupakan salah satu dari sembilan belas kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, dengan delapan kecamatan, 61 Nagari serta satu desa, serta 263 Jorong. Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto VII, serta Kecamatan Sumpur Kudus

termasuk di antara delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Karena keterbatasan waktu serta sumber daya, maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan Musrenbang Nagari serta melakukan penelitian hanya pada satu Nagari yaitu Nagari Bukit Bual di Kecamatan Koto VII. Kajian ini dilakukan pada Musrenbang Nagari karena komunikasi yang menarik yang mempertemukan nara sumber (pejabat pemerintah) serta peserta (masyarakat) untuk membahas/menegosiasikan ide serta usulan pembangunan. Maka dari itu, untuk mengetahui proses komunikasi antara sumber pesan serta penerima pesan dapat merubah tingkat indikator komunikasi persuasif pada masyarakat peserta Musrenbang dapat mencapai sasaran, penulis melakukan analisis lebih lanjut.

Pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa beberapa faktor seperti karakter partisipan, pemberi pesan, serta penerima pesan saling berkesinambungan satu sama lain. Atas dasar itu, masalah penelitian digambarkan sebagai rumus berikut:

“Apakah terdapat hubungan antara komunikasi persuasif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tingkat komunikasi persuasif dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

2. Menjelaskan hubungan komunikasi persuasif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Secara Keilmuan

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan peneliti dibidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi persuasif dan komunikasi pembangunan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembacanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan studi ilmu komunikasi dan khususnya studi komunikasi persuasif. Dengan kerangka pemikiran tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan studi ilmu komunikasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.3.2.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan nagari yaitu wali nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dalam melakukan setiap proses pelaksanaan musrenbang dengan lebih baik serta lebih mengedepankan komunikasi persuasif dan bagi pemerintah kabupaten sijunjung dalam menyelenggarakan musrenbang yang lebih baik serta memberikan bobot yang lebih besar kepada aspirasi serta masukan masyarakat/stakeholder dalam merencanakan inisiatif pembangunan di daerahnya masing-masing.